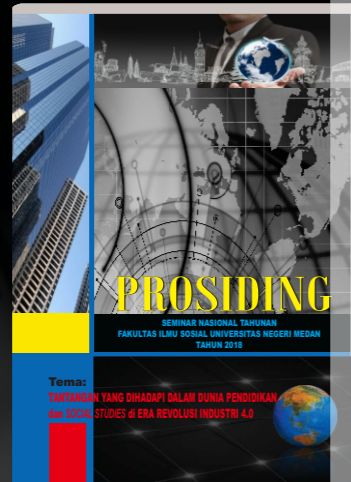


PROSIDING



<http://semnasfis.unimed.ac.id>



PROSIDING SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



9 772548 435001

DIGITAL LIBRARY
Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2018

Tema: Tantangan Yang dihadapi Dalam Dunia Pendidikan
dan Social Studies di Era Revolusi Industri 4.0

Vol. 2, Tahun 2018

p-ISSN 2549-435X



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL TAHUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN 2018

Tema:
**TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
dan SOCIAL STUDIES di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan prosiding seminar nasional sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan seminar nasional tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Seminar nasional tahun 2018 mengangkat tema tentang : “Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Dan *Social Studies* Di Era Revolusi Industri 4.0” dengan sub-sub tema yang meliputi : (1) Tantangan Yang Dihadapi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0; (2) Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0; (3) Strategi Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Menghadapi Revolusi Industri 4.0; (4) Pembelajaran Karakter Berbasis IT; (5) Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0; (6) Peningkatan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0; (7) Pembelajaran Berbasis Tanggap Bencana; (8) Pembelajaran Sejarah Berbasis Internet.

Di era revolusi industri 4.0 yang penuh dengan perubahan dan tuntutan, mengharuskan lembaga pendidikan dapat merespon dan melakukan inovasi secara komprehensif terhadap kurikulum dengan segala perangkat pembelajarannya. Untuk itu, diharapkan melalui kegiatan seminar nasional ini dapat diperoleh ide-ide dan gagasan-gagasan baik dari para narasumber maupun dari peserta yang terdokumentasi dalam bentuk prosiding seminar nasional. Kehadiran prosiding ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para akademisi dan guru dalam meningkatkan kompetensi di era revolusi industri 4.0.

Tim penyusun menyadari bahwa prosiding dari hasil seminar ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca yang budiman untuk kesempurnaan prosiding ini. Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukannya hingga terselesaikannya prosiding ini.

Medan, Desember 2018
Dekan FIS UNIMED

Dra. Nurmala Berutu, M.Pd

THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Kajian Tantangan Pembelajaran IPS di Era 4.0 Prayoga Bestari	439 - 442
Pendidikan HAM di Era Digital; Peluang dan Tantangan Majda El Muhtaj	443 - 447
Pembelajaran Karakter Berbasis IT Ricu Sidiq	448 - 450
Tantangan Pendidikan pada Era Revolusi 4.0 Murni Eva Marlina Rumapea	451 - 455
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia “Autoplay” untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sri Hadiningrum	456 - 459
Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Supsiloani	460 - 464
Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Mengadapi Bencana Banjir (Studi di SD Negeri No.060970 dan SD Negeri No.065009) Kecamatan Medan Belawan Poppy Ramadhani & Nurmala Berutu	465 - 470
Penggunaan Aplikasi <i>Learning Management System</i> pada Model Pembelajaran <i>Hybrid/ Blended Learning</i> sebagai Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Prodi Pendidikan Antropologi UNIMED Ayu Febryani	471 - 474
Pengaruh Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> terhadap Hasil Belajar PKn Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNIMED Sri Yunita	475 - 478
Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah dalam Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNIMED Tahun 2017 Parlaungan Gabriel Siahaan, Dkk	479 - 484
Relasi Elit dengan Rakyat Kaitannya dengan Masa Depan Ideologi Negara Tm. Jamil & Maimun	485 - 488
Kecenderungan Sentipetal pada Masyarakat Jawawawo – Keo Tengah Yakobus Ndona	489 - 493
Strategi Adaptasi Mahasiswi dalam Menempuh Peminatan di Program Studi Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan Ratih Baiduri & Boyke Rinaldi Panggabean	494 - 496
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Sosiologi & Antropologi Budaya Hodriani & Rosnah Siregar	497 - 501
Integrasi Sains dan Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Hapni Laila Siregar	502 - 506
Pemilihan Tanpa Kontestasi : Kotak Kosong Versus Kandidat Tunggal pada PILKADA Serentak 2018 di Kabupaten Deli Serdang Eron L. Damanik	507 - 511

RELASI ELIT DENGAN RAKYAT KAITANNYA DENGAN MASA DEPAN IDEOLOGI NEGARA

Dr. TM. Jamil, M.Si.1

Maimun, S.Pd.,MA2

1Dosen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

2Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.

Corresponding author : tm_jamil@unsyiah.ac.id dan maimunaceh@unsyiah.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relasi sosial-politik antara elit dengan rakyat kaitannya dengan masa depan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Penulisan artikel ini didasarkan pada pendekatan deskriptif melalui analisis realitas empiris dan juga kajian teoretis. Beberapa tawaran solutif dalam tulisan ini sebagai upaya pembinaan relasi antara elit dengan rakyat terkait dengan masa depan ideologi negara yaitu: adanya pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah; (1) melalui tahapan jangka panjang, pemerintah harus menjamin keberlangsungan pendidikan karakter kebangsaan bagi semua komponen bangsa, termasuk yang paling utamanya adalah pejabat Negara, jika perlu syarat menjadi pejabat Negara harus sudah mengikuti pendidikan karakter kebangsaan yang diatur melalui peraturan operasionalnya. (2) tahapan jangka pendek, sebagai pemangku kepentingan, pemerintah harus mampu mewujudkan kebijakan yang adil, tanpa memihak dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak dibandingkan dengan kepentingan golongan.

Kata Kunci: Relasi sosial dan Politik, Ideologi Negara

PENDAHULUAN

Ada "keresahan" mendalam yang terlihat pada hampir setiap raut wajah anak negeri dalam 10 tahun terakhir. "Keresahan" itu sangat beralasan, hingga "keresahan" terkadang termanifestasi dalam sikap; pesimistis, apatis dan juga pragmatis rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, akhir-akhir ini anak negeri dihadapkan pada berbagai persoalan kebangsaan, sehingga dalam kumpulan puisinya Taufik Ismail menyebutkan "Indonesia Bagaikan Perahu yang akan Segera Tenggelam" Kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam 10 tahun terakhir, memberi sinyal penting betapa ancaman laten dan ancaman nyata terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia sedang berlangsung secara sistematis. Ancaman yang datang silih berganti telah memaksa seluruh elemen bangsa turut ambil bagian dalam upaya mengurai "benang kusut" kompleksitas permasalahan tersebut.

Beberapa kasus yang dapat dilihat akhir-akhir ini yang bersifat mengancam diantaranya adalah munculnya gerakan laten pro terhadap ideologi komunis, yang dapat dilihat dari adanya logo komunis yang mulai digunakan oleh oknum tertentu, adanya juga yang memakai logo tersebut di baju kaos, topi dan stiker serta tempat lainnya, dan yang paling kita khawatirkan adalah mulai ada sinyal bahwa ideologi komunis mulai dibicarakan dalam forum-forum khusus secara bebas. Selain itu, aksi-aksi radikal lainnya juga "kerap" terlihat di layar kaca televisi. Tindakan radikal yang notabeneanya berasal dari organisasi masyarakat, sehingga radikalisme ini menjadi ancaman serius terhadap ideologi negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Dari sederetan masalah yang ada, tulisan ini lebih difokuskan pada tiga masalah serius yang sedang dihadapi bangsa akhir-akhir ini, yaitu: separatisme, terorisme dan radikalisme, dan tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyampaikan analisis relasi sosial-politik elit dengan rakyat kaitannya dengan masa depan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

PEMBAHASAN

Potensi Ancaman

Secara umum, ancaman yang dihadapi oleh suatu bangsa dapat dilihat dari dua; (a) ancaman dari dalam, (b) ancaman dari luar. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, juga dihadapkan pada dua ancaman nyata. Namun, dalam tulisan ini kita lebih memfokuskan pembicaraan pada ancaman yang terdapat di dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kenapa demikian? terdapat beberapa alasan utama mengapa ancaman dari dalam menjadi sangat penting dibicarakan, dan jawabannya sangat sederhana yaitu "jika kuat di dalam, maka ancaman dari luar mudah dihadapi, namun sebaliknya jika di dalam diri masyarakat kita saja tidak kuat, maka ancaman dari luar sangat mudah masuk dan mempengaruhi secara leluasa masyarakat kita dengan pola dan pendekatan tertentu", apalagi di zaman yang serba terbuka ini, pihak luar dengan mudah menggoyahkan nilai-nilai pancasila sebagai Ideologi.

Sebagai bangsa yang besar, dan bangsa yang multikultur, terdapat dua potensi dasarnya yang bersifat negatif dan positif, yaitu; potensi integrasi dan potensi disintegrasi. Hal ini didasari oleh adanya perbedaan yang sangat fundamental dalam masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya perbedaan agama, adat dan tradisi, suku dan bahkan bahasa. Integrasi bangsa dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultur, dengan prasyarat utamanya yaitu adanya perhatian

husus terhadap aspek keadilan dan kesederajatan, baik dipraktekkan dalam kehidupanberbangsa maupun kehidupan bernegara. Begitu juga sebaliknya, potensi disintegrasi bangsa dapat terjadi apabila prasyarat terhadap integrasi tidak dapat diwujudkan.

Sejarah terjadinya gerakan separatis di Indonesia, baik di Aceh, Papua maupun beberapa gerakan separatis lainnya di nusantara, merupakan bentuk protes rakyat atas ketidakadilan pemerintah pusat terhadap rakyat di daerah, dalam bahasa yang lebih ekstrem rakyat berjuang akibat adanya “penjajahan” terstruktur dan sistematis yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Akibatnya, gerakan itu muncul bukan sekedar melawan pemerintahan yang sah, tetapi gerakan separatis telah beralih kepada anti terhadap ideologi Negara Pancasila. Dalam kasus Aceh, anti terhadap Pancasila terjadi dalam waktu yang tergolong lama, kita ambil saja batasnya sejak 1989 sampai dengan tahun 2004, dan anti terhadap Ideologi Negara itu sudah terjadi dalam dua bentuk, yaitu; (1) bentuk struktural dan (2) bentuk kultural, sampai dengan klimaknya bahwa di beberapa kabupaten di Aceh telah menganggap “Aceh bukan lagi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” ketika itu. Begitu juga yang terjadi di Papua melalui gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) nya, ideologi separatisme telah merambah sampai ke masyarakat bawah, sehingga sampai dengan saat ini Papua masih tergolong ke dalam wilayah krisis ideology. Sedangkan di Aceh, pasca kesepakatan damai antara pemerintah dan Pemberontak, anti terhadap pancasila mulai terlihat redup dari sisi struktural, sedangkan pada ranah kultural anti terhadap pancasila masih sangat kental, dan dapat kita sebut sebagai adanya gerakan laten anti terhadap ideologi Negara yang bernama Pancasila dalam masyarakat Aceh, bagaikan bom waktu saat masanya tiba akan meledak dan kembali ke siklus awal yaitu gerakan separatis Aceh Baru dengan nama baru dan bahkan juga pola-pola pendekatan yang baru pula. Dalam hal ini kita dapat merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Galtung (1967), menurut Galtung “antara consensus dan integrasi bagaikan dua sisi mata uang, yang pada masanya akan muncul sisi pertama dan sisi ke dua, hal ini disebabkan oleh capaian-capaian atas consensus tidak terwujud dengan baik dan Galtung Menyebutnya dengan “damai positif dan damai negatif”.

Selain gerakan separatis, masyarakat multikultur juga dihadapkan pada “tawaran” radikalisme yang amat potensial, baik potensi yang muncul di tingkat elit maupun potensi yang muncul dalam masyarakat bawah. Dalam banyak referensi dapat difahami bahwa “radikalisme merupakan paham yang membuka peluang terhadap lahirnya kekerasan dan mengakui kekerasan sebagai tindakan yang wajib dilakukan untuk melawan rezim otoriter”. Dalam hal ini mari kita mengutip apa yang disampaikan oleh Sartono Kartodirdjo dalam Nuhrison (2009) bahwa “radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa” sama halnya dengan definisi yang terdapat dalam kamus oxford (2000) bahwa “Radikal dalam bahasa latin radix yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata radical dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan radicalism artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.

Apabila kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kita telah melewati beberapa fase perubahan besar, diantaranya adalah pergantian rezim otoriter ke rezim demokratis yang terlihat dalam dalam tiga fase penting, yaitu: fase orde lama, orde baru dan reformasi 1998. Radikalisme telah wujud dalam tiga fase tersebut, hanya saja berbeda dalam aspek pola dan pendekatan yang terjadi, begitu juga dengan era reformasi, dimana reformasi yang seharusnya sebagai tonggak demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perjalanannya reformasi telah dimaknai salah oleh beberapa elit politik di negeri ini, sehingga reformasi bukan sekedar pelopor demokrasi Indonesia, namun juga reformasi menjadi masa-masa rentan terhadap lahirnya radikalisme di Indonesia yang didasarkan pada agama, suku dan bahkan golongan. Misalnya, dalam aspek agama, penganut agama tertentu telah salah dalam memahami reformasi, sehingga mereka menganggap bahwa reformasi sebagai proses aktualisasi agama sendiri dengan menafikan batas-batas humanism, sehingga banyak kemunculan konflik agama akibat kesalahan dalam memaknai reformasi. Dalam kesimpulan dari tulisannya Rumagi (2013) disebutkan bahwa kemunculan konflik agama salah satu penyebabnya adalah kegagalan tokoh dalam memahami perbedaan, sehingga memunculkan sikap in-toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Robert Gurr (Nuhrison, 2009) bahwa; sesungguhnya pelaku radikalisme tidak hanya negara terhadap warga negaranya, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap regim yang berkuasa. Radikalisme jenis ini biasa dikenal dengan radikalisme politik yaitu radikalisme masyarakat sipil yang dilakukan berdasarkan isu-isu politik, terutama yang terkait dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan di dalam organisasi politik, atau juga ditujukan pada pemerintah, atau organisasi-organisasi politik yang bisa berbentuk revolusi, perang gerilya, ataupun kudeta”

tidak hanya muncul antara pemeluk agama yang berbeda, namun juga dapat muncul akibat perbedaan budaya dan dapat terjadi diakibatkan oleh hal-hal yang sangat sederhana, contohnya dalam proses pelayanan publik, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses pelayanan administrasi publik yang tidak transparan dan tidak berbasis pada prinsip good governance dan cleane government dapat menyebabkan tindakan radikal dari orang yang dilayani, mengapa tidak misalnya saja proses pelayanan lebih mengutamakan orang yang satu suku, orang yang punya ikatan emosional dan bahkan mengutamakan saudara sendiri, sehingga individu lain menganggap pemerintah sedang mempraktekkan sikap anti terhadap suku lain, sehingga tidak jarang terjadinya tindakan radikal yang berbasis pada anarkhisme perilaku individu terhadap pemerintah, dan perlu kita ketahui bahwa hal ini telah menjadi rahasia umum sampai dengan saat ini, dan masih berlangsung di Indonesia. Sehingga, ini dikategorikan sebagai benih dari radikalisme dalam ranah yang lebih luas.

Begitu juga dengan teorisme, sebenarnya antara separatisme, radikalisme dan terorisme sama-sama memiliki prinsip tindakan yang dapat melanggar norma, naik norma agama, norma hukum maupun norma sosial yang hidup dalam setiap masyarakat. Namun lebih jauh lagi bahwa terorisme menjadi ancaman yang sangat serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Teroris tergolong ke dalam kejahatan terberat atau istilah lainnya *extra ordinary crime*. Menurut Galtung dalam Rahardanto (2012) bahwa "Terorisme disatu pihak disebut dengan "teroris", namun di pihak dan oleh pihak lainnya bisa jadi disebut "pejuang" (*one person's terrorist is another person's freedom fighter*). Aneh memang, terorisme terkadang dianggap pejuang oleh beberapa pihak dan "penyakit" oleh pihak lainnya. Namun, secara umum bahwa terorisme merupakan musuh bagi semua bangsa di dunia.

Potensi terorisme di Indonesia sangat besar dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Indonesia menjadi "sarang" bagi tumbuh dan berkembangnya terorisme. Doktrin teroris dimulai dari kelas bawah, dan kemunculannya dapat disebabkan oleh beberapa sebab utama, namun yang paling sederhana dan perlu kita fahami bahwa kemunculan teroris di Indonesia lebih disebabkan oleh praktek ketidakadilan yang terlihat dari sikap dan perilaku kaum elit penguasa dengan rakyat. Praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila telah melahirkan sikap yang antipasti terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, kenapa demikian jawaban sederhananya adalah Karena pejabat Negara dan elit merupakan barometer dari Negara itu sendiri. Sadar atau tidak, harus kita akui bahwa banyak sikap elit penguasa di negeri ini yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga muncul berbagai protes dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah teroris. Dalam sejarah dunia, salah satu penyebab munculnya terorisme adalah akibat Negara-negara adikuasa tidak adil dalam memperlakukan Negara-negara lain yang tertinggal, eksplorasi kekayaan alam yang ada di Negara lain oleh Negara adikuasa telah menyebabkan protes keras dalam bentuk terror dan terorisme sebagaimana yang dialami oleh amerika serikat dan sekutunya. Sebagai Negara adikuasa, amerika telah mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam di belahan dunia, sehingga muncul tindakan nyata dalam bentuk balas dendam atau istilah yang lebih tepatnya adalah *weapon of the week* dari kelompok termarginal yang ada di Negara-negara yang di eksplorasi tersebut.

Alternatif dan Solusi Penyelesaian

Separatisme, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan dasar Negara, maka diperlukan beberapa langkah kongkrit dan nyata oleh pemerintah, masyarakat dan semua elemen yang ada. Terdapat dua tahapan yang dapat dilakukan, yaitu; (1) tahapan jangka panjang, dan (2) tahapan jangka pendek. Melalui pendekatan jangka panjang, pemerintah harus menjamin keberlangsungan pendidikan karakter kebangsaan bagi semua komponen bangsa, termasuk yang paling utamanya adalah pejabat Negara, jika perlu syarat menjadi pejabat Negara harus sudah mengikuti pendidikan karakter kebangsaan, pola dan teknik pelaksanaannya dapat saja diatur melalui peraturan operasionalnya.

Kemudian, dalam ranah jangka pendek, sebagai pemangku kepentingan, pemerintah harus mampu mewujudkan kebijakan yang adil, tanpa memihak dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak dibandingkan dengan kepentingan golongan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan dapat merasakan kemakmuran hidup dalam Negara yang kaya akan sumber daya alam ini. Selain itu, tawaran alternatif lainnya adalah elit politik harus mampu membangun relasi sosial yang baik dengan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap rakyat awam, sebagaimana yang disampaikan oleh Athuser dalam Thomson (nuraini, 2010) bahwa "relasi sosial politik menjadi penting untuk dibicarakan dan diwujudkan antara elit politik dengan masyarakat awam, hal ini untuk mengurangi resistensi antara masyarakat yang multikultur dengan kaum elit. Dengan demikian, maka akan dapat dijamin keberlaangsungan Pancasila sebagai Ideologi Negara tetap terjaga walaupun zaman terus berubah.

SIMPULAN

Beberapa kasus yang dapat dilihat akhir-akhir ini yang bersifat mengancam terhadap ideologi negara diantaranya adalah munculnya gerakan laten pro terhadap ideologi komunis, yang dapat dilihat dari adanya logo komunis yang mulai digunakan oleh oknum tertentu, adanya juga yang memakai logo tersebut di baju kaos, topi dan stiker serta tempat lainnya, dan yang paling kita khawatirkan adalah mulai ada sinyalemen bahwa edeologi komunis mulai dibicarakan dalam forum-forum khusus secara bebas. Selain itu, aksi-aksi radikal lainnya juga "kerap" terlihat di layar kaca televisi. Tindakan radikal yang notabeneanya berasal dari organisasi masyarakat, sehingga radikalisme ini menjadi ancaman serius terhadap ideologi negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Adapun tawaran solutif dalam tulisan ini sebagai upaya pembinaan relasi antara elit dengan rakyat terkait dengan masa depan ideologi negara yaitu: adanya pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah; (1) melalui tahapan jangka panjang, pemerintah harus menjamin keberlangsungan pendidikan karakter kebangsaan bagi semua komponen bangsa, termasuk yang paling utamanya adalah pejabat Negara, jika perlu syarat menjadi pejabat Negara harus sudah mengikuti pendidikan karakter kebangsaan yang diatur melalui peraturan operasionalnya. (2) tahapan jangka pendek, sebagai pemangku kepentingan, pemerintah harus mampu mewujudkan kebijakan yang adil, tanpa memihak dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak dibandingkan dengan kepentingan golongan.

REFERENSI

- Ambiro Puji Asmaroini. Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi; Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1, No. 2, 2017. E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.
- Ahmad Asrori. Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. Jurnal IAIN Raden Intan Lampung . Volume 9, Nomor 2, Desember 2015
- A.S.Hornby, oxford Advenced, Dictionary of current English. UK: Oxford university press, 2000- 691.
- Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional; Jurnal Penelitian Politik vol. 11. Nomor 22014 -E-ISSN: 2502-7476.
- Haryanto. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2, November 2009 (131-148) ISSN 1410-4946
- Imam Setyobudi dkk. Kendala Multikulturalisme Indonesia; analisis diakronis dan sinkronis. Jurnal Mudra Vol 26, no 2 tahun 2011. ISSN.0854-3461
- Michael Seno Rahardanto. Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis. Jurnal Eksperientia (Jurnal Psikologi Indonesia)vol 1 nomor 1 ISSN. 2252-7702 tahun 2012.
- Nuraida. Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia. Jurnal Wardah: No. 23/ Th. XXII/Desember 2011.
- Nuhrison M. Nuh. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal di Indonesia. Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol VIII Juli-September 2009.

